

WANITA JAWA SEBAGAI PENJAGA TRADISI, PEMBIMBING ANAK, PENJUNJUNG AGAMA, DAN PENGGEMAR SASTRA

Fandy Aprianto Rohman

Wikimedia Yogyakarta

Jalan Bima, Randuagung, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman

Kontak: 0838-6181-8180

e-mail: apriantofandy47@gmail.com

Naskah Masuk: 25-07-2020

Revisi akhir: 26-10-2020

Disetujui terbit: 31-10-2020

JAVA WOMEN AS A TRADITION GUARD, CHILD COACH, RELIGIOUS OFFICER, AND LITERATURE FANS

Abstract

Javanese women have played a significant role in politics and society. One of the main roles of princesses and court aristocrats is as guardian of the dynasty or wangsa and heir to Javanese tradition. This research was conducted to describe the history of women and their role in everyday life in the southern part of the palace in Central Java in the 18th to early 19th centuries. Methodologically, this research was conducted in four stages, namely heuristics, internal and external criticism, interpretation, and historiography. Based on the study obtained, it can be seen that women born from kingdoms in southern Central Java at least until the end of the Java War had the opportunity to take personal initiative. Their traces were then felt in what was then considered a male affair, namely the world of politics and culture.

Keywords: *women, tradition, Javanese.*

Abstrak

Wanita Jawa pernah mengambil peran cukup signifikan dalam urusan politik dan masyarakat. Salah satu peran utama putri raja dan bangsawan keraton adalah sebagai pemelihara dinasti atau wangsa serta pewaris tradisi Jawa. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tentang sejarah wanita dan peran mereka dalam kehidupan sehari-hari di keraton Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Secara metodologis, penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik internal dan eksternal, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan kajian yang diperoleh dapat diketahui bahwa para wanita yang lahir dari kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan setidaknya hingga akhir Perang Jawa memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif pribadi. Jejak mereka kemudian terasa di bidang yang kemudian dianggap sebagai urusan laki-laki, yaitu dunia politik dan kebudayaan.

Kata kunci: wanita, tradisi, Jawa.

I. PENDAHULUAN

Peran wanita “perkasa” di ruang publik, terutama politik Indonesia, menjadi topik hangat setelah Presiden Jokowi menunjuk sembilan wanita sebagai anggota panitia seleksi (Pansel) komisaris atau pemimpin baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak 19 Mei 2015, Pansel KPK yang terdiri atas ahli-ahli hukum, psikologi, sosiologi, tata kelola pemerintahan, dan manajemen organisasi banyak dikomentari media massa. Namun, para aktivis wanita Indonesia berharap seleksi ini dapat “mendorong” para tokoh wanita untuk ikut mendaftar proses seleksi para komisioner KPK, yang selama ini sangat minim dalam hal keterwakilan wanita.¹ Mungkin, terlalu dini untuk mengambil kesimpulan bahwa keputusan Presiden Jokowi atas keanggotaan Pansel KPK merupakan suatu perubahan mendasar dalam haluan politik pemerintahan Indonesia.

Kendati demikian, apabila menoleh ke belakang dan menyaksikan sejarah pra-kolonial Jawa dengan pengaruh Polinesia asli yang sangat kuat, kita akan mendapatkan petunjuk bahwa sebelum era Hindia Belanda (1818-1942), yang disebut dengan *high colonial period* atau zaman kolonial sesungguhnya, wanita Jawa pernah mengambil peran cukup signifikan dalam urusan politik dan masyarakat. Peribahasa “tangan yang menggoyang ayunan menggerakkan dunia!” mungkin tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Jawa pra-kolonial, tetapi lebih tepat dikatakan “tangan dengan gendongan kain jarak menggerakkan dunia”. Tahun-tahun sebelum meletusnya Perang Jawa (1825-1830), peran wanita elite sangat menentukan di berbagai bidang, termasuk politik, perdagangan, militer, budaya, keluarga, dan kehidupan sosial istana Jawa Tengah hingga bagian selatan.²

Pada zaman yang penuh dengan gejolak politik akibat transisi era *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) menuju zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda itu (1818-1942), wanita tidak hanya sekadar menjadi *kanca wingking* (teman ranjang), melainkan ikut berperan di bidang yang kelak dianggap dunia laki-laki, yaitu politik, militer, dan perniagaan. Sumber yang dapat dipakai untuk menuliskan sejarah wanita beraneka ragam, tetapi yang paling penting tentunya adalah naskah Jawa, terutama babad dan hikayat, surat pribadi, dan silsilah.

Salah satu contoh dari naskah yang disebut terakhir adalah *Serat Salasilah para Leloehoer ing Danurejan* (Silsilah Nenek Moyang Danurejan). Naskah ini mencatat sejarah leluhur keluarga priayi agung yang berasal dari Banyumas, yang melahirkan sebagian besar calon *pepatih dalem* Kesultanan Yogyakarta antara Perjanjian Giyanti (1753) dan masa penghapusan jabatan itu pada 1945, ketika pendudukan militer Jepang berlangsung (1942-1945).³ Naskah ini tersimpan dalam koleksi Panti Budaya, Museum Sonobudoyo, Yogyakarta, dan sebuah salinan yang diketik pada 1932 di Fakultas Sastra Jawa Universitas Indonesia, Depok.⁴

Silsilah tersebut menjelaskan peran wanita dan hubungan darah beberapa “dinasti” pejabat terkemuka di Kesultanan Yogyakarta pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pun demikian, sejarah wanita Jawa sebelum abad ke-20 belum ditulis secara lengkap, masih terdapat *way forward* atau upaya maju dengan menggunakan sumber lokal, terutama silsilah keluarga terkemuka di Jawa. Sebaliknya, arsip kolonial Belanda jarang, tetapi jarang membicarakan masalah mengenai wanita, kecuali dalam kasus saat pejabat Belanda yang ditugaskan di istana kerajaan-kerajaan Jawa mencium pengaruh politik berlebihan seorang permaisuri atau bangsawan wanita tertentu. *Memorie*

¹ Ihsanuddin, “Jokowi Tunjuk 9 Anggota Pansel KPK, Semuanya Perempuan”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/21/08473141/Jokowi.Tunjuk.9.Anggota.Pansel.KPK.Semuanya.Perempuan>. Diakses tanggal 13 Agustus 2020.

² Peter Carey dan Vincet Houben, *Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018), hlm. x.

³ Selo Soemardjan, *Social Changes in Yogyakarta*, (Ithaca: Cornell University Press, 1962), hlm. 51.

⁴ Naskah aksara Jawa dibeli oleh Ir. J.L. Moens (1907-1954) untuk *Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* pada 1930. Disalin dalam aksara latin oleh G. Th. Pigeaud dengan salinan yang dibuat tahun 1932 oleh juru tulis Pigeaud, Carik Mandasastra, untuk Museum Sonobudoyo (Inventaris No. PB B49) dan Perpustakaan Fakultas Sastra Jawa, Universitas Indonesia, Depok (Inventaris No. G40).

van overgave (memori serah terima jabatan) seorang residen kepada penggantinya sangat bermanfaat dalam kasus ini, sebab sering memuat data tentang wanita elite istana serta karakternya.⁵

Arsip Belanda umumnya mencerminkan suatu realitas kolonial Hindia Belanda yang didominasi kaum laki-laki, suatu realitas yang kental dengan sentimen *male chauvinist* (pemuja kejantanan) – yang paling menonjol pada zaman Daendels (1801-1811), yaitu ketika tersua catatan-catatan pinggir surat Residen Yogyakarta: “wanita tidak memiliki tempat dalam penghormatan umum, dan terhadap wanita hanya ada urusan pribadi!”⁶

Realitas itu juga dapat ditelusuri dalam roman dan memoir para pengarang Hindia Belanda. Masyarakat kolonial dilukiskan carut-marut oleh perbedaan nyata antara “golongan” etnis, kelas, dan kedudukan sosial. Salah satu kesenjangan paling utama adalah antara kaum wanita dan lelaki: ruang sempit yang membelit hidup wanita elite Jawa. Pada awal zaman “kebangkitan nasional” abad ke-20, dapat diketahui contoh tragisnya adalah seorang Raden Ajeng Kartini (1879-1904).⁷

Melihat perkembangan peranan wanita seperti yang digambarkan sebelumnya, konsep tentang peran wanita harus dijelaskan secara utuh. Pada dasarnya, kesamaan hak wanita harus tetap memiliki batasan-batasan moral tertentu, sehingga mempunyai identitas sesuai dengan kepribadian bangsa dan budaya bangsa. Batasan moral harus dijadikan acuan untuk melakukan kontrol sosial agar kesamaan hak terkendali, sehingga nilai-nilai luhur kewanitaan dapat dipertahankan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan beberapa permasalahan, yaitu 1) Bagaimana peran wanita sebagai pemelihara pertalian wangsa? 2) Bagaimana peran wanita sebagai pewaris tradisi Jawa? 3) Bagaimana peran wanita sebagai penggemar sastra? Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah

memberikan konteks yang lebih luas bagi peran perempuan pada era reformasi sekarang. Penelitian mengenai wanita merupakan sesuatu yang penting untuk tidak sekadar mengingat jasa-jasanya saja, tetapi juga sebagai pengimbang wacana moral dari perspektif laki-laki dan wanita. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggeser dominasi penelitian sejarah yang bercorak *androcentris* (berpusat pada peran laki-laki) menuju rekonstruksi sejarah yang *androgynous* (melibatkan laki-laki dan wanita), khususnya pada masa Hindia Belanda.⁸

Secara metodologis, penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik internal dan eksternal, interpretasi, dan historiografi.⁹ Penelitian ini juga menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisa yang didasarkan pada hubungan sebab-akibat dari fenomena historis pada cakupan waktu dan tempat. Dari analisa tersebut dihasilkan tulisan deskriptif-analitis. Sejarah analitis merupakan sejarah yang berpusat pada pokok-pokok permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut lantas diuraikan secara sistematis. Dengan titik berat pada permasalahan inilah, sejarah analisis juga membutuhkan bantuan ilmu-ilmu sosial dalam kajiannya.¹⁰

II. WANITA SEBAGAI PEMELIHARA PERTALIAN WANGSA

Meskipun peran wanita dalam urusan seremonial, militer, dan bisnis sangat penting dalam tahun-tahun menjelang Perang Jawa, peran utama putri raja dan bangsawan keraton adalah sebagai pemelihara dinasti atau wangsa. Dengan demikian, mereka memelihara hubungan kekerabatan antara raja dan keluarga terkemuka kerajaan dengan mengikat istana dalam suatu jaringan intim dengan dunia perdesaan Jawa melalui ikatan kekeluargaan yang luas.

⁵ Peter Carey, *Babad Dipanegara: An Account of the Outbreak of the Java War (1825-1830)*, (Kuala Lumpur: Art Printers, 1981), hlm. xxxiv.

⁶ Peter Carey dan Vincet Houben, *op.cit.*, hlm. xi-xii.

⁷ *Ibid.*, hlm. xii.

⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 128.

⁹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 39.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 9.

Seperti diketahui, para raja Jawa Tengah bagian selatan dapat memiliki hingga empat istri resmi atau *garwa padmi* dan sejumlah istri tidak resmi, yaitu selir atau *garwa ampéyan*. Pakubuwana IV di Surakarta memiliki 56 anak dari dua permaisuri, keduanya kelahiran Pamekasan (Madura) dan lebih dari 25 *garwa ampéyan*.¹¹ Pada periode yang sama, Hamengkubuwana II di Yogyakarta memiliki setidaknya 80 anak dari tiga *garwa padmi* dan sekitar 30 *garwa ampéyan* (selir).¹² J.W. Winter, sang penerjemah resmi di Surakarta, menceritakan keadaan Sunan Pakubuwana V (bertakhta 1820-1823) ketika tidur pada malam hari dengan para *garwa padmi* dan siang hari dengan selirnya. Dari para selir itu, ada 12 yang digolongkan “utama” – mereka diambil dari anak-anak wanita priayi utama atau pangeran dan bangsawan berdarah biru.¹³

Berbeda dengan *abdi-dalem priayi manggung* atau *prajurit èstri*, yang selalu menemani raja ketika pesiar di luar keraton, selir kelas utama tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di luar istana. Selir “kelas dua” adalah sebuah kelompok yang sangat heterogen. Para penari Serimpi dari keluarga bangsawan golongan atas termasuk barisan mereka, juga hampir semua kerabat raja. Oleh sebab itu, mereka jarang dipakai sebagai wanita simpanan oleh sunan – setidaknya zaman pemerintahan Pakubuwana V. Namun, banyak pula selir kelas dua raja yang dipilih sebagai istri tidak resmi karena kecantikan dan daya tarik seksualnya.¹⁴

Mementingkan daya tarik seksual wanita tampaknya tercermin kepada jenis pendidikan yang diberikan kepada anak gadis oleh ibundanya di Keraton Surakarta pada zaman Winter menjabat sebagai penerjemah resmi. Dalam kata-kata sang penerjemah Indo-Belanda itu:

“(....) Pelajaran tentang menulis, membordir, dan menjahit tidak memiliki tempat (dalam pendidikan mereka) [...] yang dianggap perlu untuk anak wanita adalah melatih mereka mengatur kecantikan. Dari kecil mereka diajarkan menepis semua rasa malu, [...] dan yang dididikan kepada wanita muda itu hanya satu hal: berparas cantik, berlagak sopan, dan bertingkah laku pantas. Untuk pergi dengan payudara mereka hampir telanjang bulat, menghindari bicara ketika bergaul dan berlatih berpura-pura dengan wajah merona malu-malu dan bersikap sembunyi-sembunyi hingga mereka pada akhirnya dipilih sebagai wanita simpanan (sunan) di keputren, ketika mereka bisa memakai daya tarik seksualnya untuk memikat raja supaya disukai di atas semua (selir) yang lain [...]”¹⁵

Tentu, daya tarik seksual adalah semacam kehasratan bagi karier sukses sebagai selir atau wanita simpanan kerajaan. Menurut Daendels, Ratu Kencana Wulan, permaisuri favorit sultan kedua, berhasil menjadi “seorang wanita luar biasa cantik dan cerdas”, ketika sang suami diasingkan ke Pulau Pinang oleh Inggris antara 1792 dan 1812. Namun, loyalitas sang permaisuri ada batasnya, yaitu walaupun dia menyertai sultan ke Batavia ketika dikembalikan oleh Inggris ke ibu kota Hindia Belanda pada April 1815, sang ratu – waktu itu bergelar Ratu Wetan – menolak ikut ke pengasingan baru di Ambon (1817-1824), ketika pemerintah Hindia Belanda (19 Agustus 1816) memutuskan untuk mengasingkan lagi mantan raja Yogyakarta itu (10 Januari 1817).¹⁶

Dua orang selir kelas dua, Bendoro Mas Ajeng Rantamsari dan Mas Ayu Sumarsonowati, juga terkenal kecantikannya. Rantamsari sebelum menjadi selir sultan kedua pernah menempuh karier sebagai teledek (penyanyi-penari), suatu pekerjaan yang membutuhkan pesona dan daya tarik seksual luar biasa. Adapun Sumarsonowati terkenal karena

¹¹ Padmasusastra, *Sajarah Dalem Pangiwa lan Panengen*, (Semarang: Van Dorp, 1902), hlm. 159.

¹² Mandoyokusumo, *Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat*, (Yogyakarta: Bebadan Museum Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, 1977), hlm. 17-27.

¹³ Peter Carey dan Vincet Houben, *op.cit.*, hlm. 46.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Peter Carey, *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 517.

kulitnya yang kuning-putih seperti warisan peranakan Tionghoa dari pesisir utara, yang dia wariskan kepada putranya, Pangeran Jayakusuma (sekitar 1787-1829). Pangeran ini kelak menjadi panglima utama dan ahli siasat Diponegoro pada Perang Jawa.¹⁷

Kehadiran wanita peranakan Tionghoa di antara selir sultan kedua pada akhir abad ke-18 menunjukkan bahwa tidak ada prasangka di kalangan keraton Jawa Tengah bagian selatan terhadap Tionghoa atau kelompok etnis lainnya pada masa “tatanan lama Jawa” sebelum pemerintahan Daendels dan masa lima tahun peralihan Inggris. Sikap itu mulai berubah setelah pemulihan rezim kolonial Belanda pada Agustus 1816, yaitu ketika Belanda berupaya memulihkan keuangan mereka dengan memakai koloni yang baru dikembalikan itu sebagai sapi perahan dan menempatkan masyarakat Tionghoa di Jawa Tengah bagian selatan dalam posisi sangat sulit. Sebagai bandar dan pemungut pajak, mereka dijadikan ujung tombak politik kolonial Belanda yang kejam dan buta terhadap derita rakyat Jawa.¹⁸

Beberapa raja di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-19 memang membanggakan diri atas kekuatan seksual dengan memiliki banyak wanita simpanan di keputren mereka. Mangkunegara V (bertakhta 1881-1896), yang terkenal gemar bermain wanita, diduga telah menginstruksikan *abdi-dalem* Mangkunegaran yang diutus ke Paris untuk menghadiri Pameran Universal (Exposition Universal) pada 1889 dan membawa kembali ke Surakarta dua *demi-mondaines* (pelacur kelas atas) guna menambah koleksi selirnya. Sayangnya, tidak ada referensi atas selir berkebangsaan Prancis itu dalam silsilah Mangkunegaran yang disusun oleh ahli genealogi Mangkunegaran, Mas Soemahatmaka, meskipun ada satu selir peranakan Tionghoa yang dipelihara raja.¹⁹

Namun, menitikberatkan kriteria seksual sebagai kunci hubungan antara penguasa dan istrinya

adalah salah. Sesuatu yang jauh lebih penting adalah latar belakang keluarga wanita pendamping raja. Pernikahan serta pertunangan anak-anak dan kerabat dekatnya memang diatur dengan tujuan pokok membentuk aliansi politik dengan keluarga lokal yang kuat atau berpotensi bermusuhan. Inilah alasan para wanita dari keluarga atau area tertentu dipilih menjadi permaisuri. Dalam kasus ini, kecantikan kalah abu dibandingkan manfaat politik yang bisa diperoleh dari perkawinan tersebut.

Kecantikan sejumlah permaisuri dari Pulau Madura yang dinikahi sunan Surakarta pada abad ke-18 tidak setanding dengan para istri Jawa. Pernikahan itu dilaksanakan untuk memastikan hubungan baik dengan para penguasa lokal Madura, terutama keluarga Cakraningratan – khususnya keturunan Panembahan Cakraningrat II (Séda Kamal 1647-1707) – dari Madura Barat (Bangkalan), yang muncul sebagai kekuatan utama dalam politik Jawa Timur pada tahun-tahun penuh perang dan gejolak politik antara 1704 dan 1757 yang disebut Perang Suksesi Jawa Kedua (1704-1723) dan yang ketiga (1746-1757).²⁰

Kondisi yang sama juga berlaku di Yogyakarta. Hanya saja, di sini pilihan jatuh kepada putri bupati *mancanegara* timur yang jauh dari keraton dan dianggap berpotensi menjadi pusat pembangkangan politik. Pemberontakan singkat Bupati Wedana Madiun, Raden Ronggo Prawirodirjo III (menjabat 1796-1810), pada November-Desember 1810 adalah satu contohnya. Dua dari tiga permaisuri sultan kedua dan sultan ketiga (bertakhta 1812-1814), memiliki latar belakang wilayah timur jauh itu. Pada saat yang sama, banyak dari anak-anak sultan, termasuk Diponegoro, menikah dengan keluarga *mancanegara* timur.²¹

Begitu kental hubungan *mancanegara* timur dengan Keraton Yogyakarta pada masa sultan ketiga menjabat sebagai Putra Mahkota (1792-1810/1811-

¹⁷ Peter Carey dan Vincet Houben, *op.cit.*, hlm. 48.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Padmasusastra, *op.cit.*, hlm. 153.

²¹ Mandoyokusumo, *op.cit.*, hlm. 17.

1812) dan Wali Kesultanan (Januari-November 1811), ketika dia bertentangan dengan ayahnya (sultan kedua), sehingga bupati *mancanegara* timur sekutu Putra Mahkota menjadi sasaran utama kemarahan sultan sepuh itu. Selain itu, juga terbit kabar tujuh bahwa bupati dihukum mati cekik sebelum Inggris menyerbu keraton pada 20 Juni 1812. Fakta bahwa beberapa anak wanita tiga sultan pertama Yogyakarta (Hamengkubuwana I, Hamengkubuwana II, dan Hamengkubuwana III) telah menjadi pasangan resmi bupati dari wilayah timur jauh itu membuat sultan lebih gampang mendispilkan mereka dengan mengancam sang suami dengan istri mereka akan disuruh kembali ke keraton.²²

Namun, hal itu tidak selalu gampang, seperti kita lihat dalam kasus Raden Ronggo. Sebenarnya, sang Bupati Wedana itu adalah menantu terhormat sultan kedua. Pada akhir dasawarsa 1790-an, dia menikah dengan putri ketiga dari sultan kedua dan permaisuri keturunan Madura bernama Ratu Kedaton. Setelah menikah, istri Bupati Wedana itu diberi gelar Ratu Maduretno dan pindah ke Madiun. Pasca 1801, dia menetap di kediaman baru yang dibangun sebagai “keraton” oleh Ronggo III di Maospati. Dalam kasus tersebut, cinta menjadi semacam pemicu pemberontakan daripada jaminan loyalitas kepada sang mertua (sultan kedua). Alasannya, cinta pasangan Ronggo dan putri raja Yogyakarta itu adalah *love match* (perkawinan karena cinta sungguhan) – hal yang agak luar biasa di kalangan keraton.²³

Ketika sang istri meninggal muda akibat keguguran (*babar lajeng séda konduran punika*) pada 16 November 1809, Raden Ronggo seperti putus asa. Dia menghabiskan siang dan malam di dekat makam sang istri tercinta di Gunung Bancak (Giripurno) yang berada di dekat Maospati dan meratap-ratap ingin mendampingi istrinya itu sampai ke akhirat. Kejadian tragis dan memilukan ini menjadi salah satu pemicu pemberontakan Raden Ronggo. Dia memilih mematuhi perintah Dendels untuk datang

ke Bogor dan menghadapi sanksi (hampir pasti diracun secara rahasia, cara favorit sang marsekal) atau memberontak dan mati mulia sebagai pahlawan. Dia akhirnya memutuskan mati sebagai senopati dan segera menyusul istri tercinta ke akhirat daripada tersiksa di bawah telapak kaki sang penjajah yang bengis itu.²⁴

III. WANITA SEBAGAI PEWARIS TRADISI JAWA

Sebagai ibu dari anak-anak kerajaan, istri-istri para raja Jawa Tengah bagian selatan tidak hanya bertugas memastikan keberlangsungan dinasti, melainkan juga dituntut melestarikan nilai-nilai budaya dan spiritual Jawa melalui pemeliharaan adat keraton dan pendidikan anak raja. Dapat dilihat di sini bahwa konteks masa kanak-kanak dan remaja para istri di dunia perdesaan, atau suasana lebih canggih di kabupaten yang jauh dari istana dan persaingan, mengakibatkan adanya sebuah dampak yang terlihat nyata.

Salah satu contoh hal tersebut dapat dilihat pada pertengahan abad ke-19 di Yogyakarta, yaitu setelah adanya pernikahan antara putra mahkota Yogyakarta dengan seorang putri Surakarta, anak dari Pakubuwana VIII (bertakhta 1858-1861) pada 1848. Menurut Raden Ngabehi Soedjono Tirtokoesoemo (menjabat dari tahun 1926-1934, pasca 1935 menjadi Patih Blora) yang bertindak sebagai *gezworen translateur* (penerjemah resmi) di Yogyakarta, acara pernikahan menandai titik balik hubungan politik Yogyakarta-Surakarta dan budaya kesultanan. Sejumlah besar pengikut dan pengrajin, khususnya tukang emas dan penjahit, yang dibawa oleh putri Surakarta dari keraton asalnya telah menyebabkan adanya sebuah transformasi yang nyata dalam gaya Keraton Yogyakarta.²⁵

Anggota istana sultan yang sebelumnya – dalam istilah khas Soedjono – “berenang dalam pakaian

²² Peter Carey, *The British in Java 1811-1816: A Javanese Account*, (Oxford: Oxford University Press, 1992), hlm. 417.

²³ Peter Carey dan Vincet Houben, *op.cit.*, hlm. 50.

²⁴ Peter Carey, (2012), *op.cit.*, hlm. 282-300.

²⁵ Peter Carey dan Vincet Houben, *op.cit.*, hlm. 65-66.

mereka”, lantas mengadopsi potongan lebih pas dan sesuai dengan mode yang mutakhir kasunanan, yaitu *krenggo busana* (dihiasi pakaian) sebagai semboyan baru kesultanan. Pengaruh budaya yang sama melalui istri dapat dilihat di Pakualaman selama pemerintahan Pakualam II, yaitu ketika saudara iparnya bernama Pangeran Ronggo Prawirodiningrat (menjabat 1822-1859) berkunjung. Dia telah mencetuskan cikal bakal tarian baru di Pakualaman, yaitu Beksa Wireng Bondoboyo, yang didasarkan pada gerak keprajuritan Beksan Gebug Madiun.²⁶

Namun sebagai pendidik dan wali anak-anak kerajaan, wanita keraton pada akhir abad ke-18 dan awal ke-19 memiliki pengaruh paling besar. Ketika masih bayi sampai pubertas – yang ditandai menstruasi pertama untuk anak wanita dan anak laki-laki dengan berlalunya upacara sunat – keturunan kerajaan dibesarkan dekat dengan ibu biologis atau ibu angkat mereka di keputren, tempat tinggal wanita keraton yang sangat luas. Keputren terletak di sisi barat kamar pribadi raja yang disebut dengan *proboyekso*. Hal itulah yang terjadi ketika beberapa anak kerajaan – biasanya pada usia dini – dipercayakan atau “dipinjamkan” kepada anggota keluarga lain di luar keraton, sesuatu yang masih berlaku dalam keluarga Jawa hingga sekarang. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk tujuan pendidikan saja, melainkan juga karena si bayi dianggap mempunyai bakat yang luar biasa atau demi memperkuat hubungan antara raja dengan kerabat dekatnya, terutama kepada mereka yang tidak lagi mempunyai anak sendiri.²⁷

Contoh paling terkenal pemuda kerajaan yang “dipinjamkan” pada usia sangat dini kepada seorang kerabat kerajaan yang jauh lebih tua adalah Pangeran Diponegoro (1785-1855). Anak sulung sultan ketiga dari *garwa ampéyan* bernama Raden Ayu Mangkorowati ini dititipkan dan dibesarkan oleh nenek buyutnya bernama Ratu Ageng (Ratu Kadipatèn) di keputren (1785-1793) dan kemudian

di kediaman baru Ratu Ageng di Tegalrejo (1793-1803).²⁸

Anggota keluarga inti Diponegoro yang juga “dipinjamkan” pada usia dini kepada kerabat sultan pertama itu adalah pamannya bernama Pangeran Mangkubumi (sekitar 1781-1851), yang dipercayakan kepada bibinya bernama Ratu Bendoro (istri cerai Raden Mas Said yang tidak mempunyai anak). Nasib yang sama juga dialami oleh paman Diponegoro bernama Pangeran Panular (sekitar 1772-1826). Dia adalah putra sultan pertama dari seorang ibu asal Blambangan yang diberikan kepada Sultan Mangkubumi oleh Gubernur Pantai Timur Laut Jawa bernama Nicolaas Hartingh (1718-1766; menjabat 1754-1761). Hartingh mahir bahasa Jawa dan menjadi dalang Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755).²⁹ Hartingh mengirim istri asal Blambangan itu sebagai imbalan atas hadiah yang diberikan sang pendiri Yogyakarta atas jasanya di Giyanti berupa selir kesayangannya bernama Raden Ayu Sepuh. Pada saat yang sama, di Surakarta adik wanita Pakubuwana IV bernama Raden Ayu Sekartaji menghabiskan sebagian besar masa kecil dan remajanya di istana Mangkunegaran ketika Raden Mas Said bertakhta (1757-1795) dan hanya kembali ke kasunanan setelah kematian ayah tirinya pada 28 Desember 1795.³⁰

Dalam “peminjaman” seperti ini, pengaruh bapak atau ibu angkat tetap dominan sepanjang hidup si anak. Pedoman “tut wuri handayani” (mengikuti di belakang dan melayani) mendedahkan peran ibu angkat dalam memberikan bimbingan terus-menerus kepada anak – terutama yang sedang belajar berjalan – tidak dengan benar-benar memegangnya, melainkan dengan selalu sigap menyelamatkan si anak begitu hendak jatuh. Peran pendukung ini tetap berjalan lama hingga anak tumbuh dewasa.

Ada keterangan menarik dalam Babad Diponegoro versi Surakarta, yaitu ketika Pangeran Diponegoro konon mengatakan bahwa “pada masa

²⁶ Peter Carey, (1992), *op.cit.*, hlm. 27.

²⁷ Peter Carey dan Vincet Houben, *op.cit.*, hlm. 66-67.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

³⁰ Peter Carey, (2012), *op.cit.*, hlm. 517.

kanak-kanak saya, orang tua itu selalu membuat saya ketakutan ketika mereka memberi perintah". Dia sangat berhutang dalam pengajaran awal agama Islam dan praktek spiritual Jawa kepada eyang buyutnya, yang diketahui menjadi penganut tarekat Shattāriyah yang juga kelak diikuti oleh Diponegoro ketika dewasa.³¹ Sama halnya dengan pamannya yang bernama Pangeran Panular, yang mempertahankan hubungan khusus dengan mantan ibu angkatnya bernama Bendoro Raden Ayu Srenggoro, sampai saat kematian Sang Raden Ayu sekitar tahun 1816.³²

Minat beberapa wanita keraton dalam hal spiritual dan keagamaan terlacak dalam sejumlah sumber Jawa awal abad ke-19. Sebagaimana dilihat bahwa wanita Jawa bisa mewarisi properti (kadang-kadang tanah cukup luas) di bawah hukum Islam-Jawa dan sejumlah wanita keraton menyumbangkan tanah perdikan. Salah satu contohnya adalah ibu sultan ketiga bernama Ratu Kedaton, seorang perempuan dengan komitmen keagamaan sangat kuat. Dia sampai mewariskan tanah sebagai kurban untuk memberkati seluruh pusat ulama *pathok nagari* (ahli hukum fikih Islam), yang dibentuk untuk memberikan saran kepada penghulu Yogyakarta tentang hal-hal yang berkaitan dengan dalil naqli. *Pathok nagari* yang berada di Dongkelan atau di selatan Keraton Yogyakarta ini meliputi 25 cacah sawah yang dikerjakan keluarga petani sikep.³³

Contoh lain kesalehan wanita dapat dilihat dalam dokumen Keraton Yogyakarta yang menugaskan pembelian unta kurban untuk santri keraton yang hendak naik haji pada Februari 1806 dengan sponsor keraton. Salah satu permaisuri sultan kedua – hampir pasti Ratu Kedaton – disebutkan dalam dokumen itu memberikan setiap santri keraon yang naik haji sebanyak 10 *réyal* (1 *réyal* = 2,50 dolar AS atau 25 dolar AS per santri) sebagai uang jalan dan 5 *réyal* (12,50 dolar AS) untuk selamatan seribu hari Ratu

Ageng Tegalorejo yang wafat pada 17 Oktober 1803. Selamatan ini diselenggarakan di Padang Arafah, tempat yang sangat bertuah untuk upacara tersebut.³⁴

IV. WANITA SEBAGAI PENGGEMAR SASTRA

Wanita tampaknya juga aktif di bidang sastra, terutama sebagai pengumpul dan penyalin teks yang berkaitan dengan Islam Jawa. Peran permaisuri Pakubuwana I (bertakhta 1704-1719) bernama Ratu Pakubuwana (sekitar 1657-1732) sudah menjadi legenda pada awal pemerintahan cucunya bernama Pakubuwana II (1726-1749). Wanita itu adalah seorang penggemar berat sastra sufi Islam dan politikus yang ulet.³⁵ Penulis wanita lain bernama Raden Ayu Danukusumo (lahir sebagai Raden Ayu Purbayasa sekitar 1756 dan meninggal pasca Desember 1822), merupakan anak sultan pertama dengan permaisurinya bernama Bendoro Raden Ayu Srenggoro – yang juga ibu dari Pakualam I. Purbayasa terkenal mahir aksara pegon – bahasa Jawa dalam aksara Arab tidak bervokal (Jawa gundul) – dan memiliki koleksi karya sastra Islam Arab versi Jawa.³⁶

Ibu patih kedua Yogyakarta (menjabat 1799-1811) yang dicekik mati di keraton (diberi istilah *séda kedaton*) pada 28 Oktober 1811 dan merupakan janda dari Bupati Wedana (nayaka) keraton bernama Raden Tumenggung Danukusumo I (sekitar 1755-1812), yang juga dicekik mati pada Januari 1812 ketika dibawa ke pengasingan di Pacitan, adalah teman baik Pangeran Diponegoro. Wanita itu sering diundang ke Tegalorejo untuk bermain catur dan berdiskusi teologis tentang sastra Islam Jawa dan Arab.³⁷

Para wanita keraton juga menjadi wali setia adat Jawa. Hal ini tampak pada awal abad ke-19, ketika pengaruh Eropa semakin terasa di kalangan keraton

³¹ *Ibid.*, hlm. 131-134.

³² Peter Carey, (1992), *op.cit.*, hlm. 386-387.

³³ Peter Carey dan Vincet Houben, *op.cit.*, hlm. 69.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 70.

³⁵ Merle Calvin Ricklefs, *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries*, (East Bridge Norwalk: Signature Books, 2006), hlm. 103-115.

³⁶ Peter Carey, (2012), *op.cit.*, hlm. 116.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 603.

Jawa Tengah bagian selatan.³⁸ Alasan keputusan eyang buyut Diponegoro bernama Ratu Ageng untuk meninggalkan Keraton Yogyakarta setelah kematian suaminya (Sultan Mangkubumi) dan tinggal di Tegalrejo, sebagian besar dipicu ketidaksetujuannya kepada gaya hidup dan sikap tak acuh putra sulungnya (sultan kedua) terhadap tugas Islam. Dikatakan, pada saat kematiannya tanggal 17 Oktober 1803 di kadipaten (kediaman putra mahkota), menjelang usia 71 tahun, Ratu Ageng pernah membisikkan kata-kata terakhir kepada anaknya (sang raja), bahwa meskipun dia sekarang “sombong dan angkuh”, kematiannya di ranjang “tidak akan lebih daripada seorang hamba”.³⁹

“Sultan! Jalan yang saya rambah itu sulit dan sekarang saya merasa bahwa saya sesungguhnya tidak lebih daripada seorang rakyat biasa. Anakku, camkanlah hal itu dan jangan percaya bahwa meskipun kamu seorang raja, setelah kamu mati kamu akan lebih daripada seorang *batur* (hamba) jelata. Hiduplah sesuai dengan itu!”⁴⁰

Hubungan bergolak antara sultan kedua dengan ibundanya menggarisbawahi betapa tangguh wanita keraton ini. Ratu Kedaton (permaisuri sultan kedua keturunan Madura) juga terbukti sebagai penentang penguasa Yogyakarta yang tak kenal lelah, terutama ketika kepentingan keluarganya dipertaruhkan. Antara Januari hingga Juni 1812 misalnya, dia bertahan menjalani hukuman kurungan selama empat periode 24 jam di Bangsal Kencono (pavilion utama di keraton dalam) daripada menyingkapkan rahasia “persekongkolan” antara pihak Inggris dan putranya (kelak sultan ketiga). Namun, hukuman itu hanya memperkuat tekad sang ratu. Selama konfrontasi sebelumnya, Residen Belanda bernama Matthijs Waterloo (menjabat 1803-1808), pernah menulis bahwa “dia (ratu Kedaton) memiliki semangat Madura yang kuat, yang sepertinya tidak surut pada masa

tuanya”. Suaminya (sultan kedua), menurut sumber yang sama, “dengan pola pemikiran Jawa yang biasa”, sama sekali tidak dapat memahami istrinya yang merupakan keturunan Pamekasan itu.⁴¹ Setelah dipulihkan sebagai sultan pada 17 Agustus 1826, sultan kedua yang semakin pikun terus didominasi oleh istri-istrinya, khususnya permaisuri terakhirnya yang sangat gemuk (ratu sultan) – mantan Raden Ayu Andayaningrat, seorang bekas komandan *prajurit èstri*.⁴²

Pada periode sedikit lebih tenang antara serangan Inggris dan pecahnya Perang Jawa, permaisuri terus memainkan peran penting dalam politik internal Yogyakarta. Hal yang paling menonjol di sini adalah janda sultan ketiga, yaitu Ratu Kencono (pasca 3 November 1814 sebagai ratu ibu; pasca 20 Juli 1820 sebagai ratu ageng), seorang perempuan kelahiran Jipang (sekarang Bojonegoro) yang cerdas dan ibunda sultan keempat (bertakhta 1814-1822). Dia bertindak sebagai wali *de facto* untuk anaknya sampai raja belia itu mencapai usia dewasa setelah merayakan hari ulang tahun ke-16 pada Januari 1820, suatu acara yang menandai kedewasaan dalam adat Jawa awal abad ke-19.⁴³

Sang ratu adalah tokoh sentral dalam faksi Keraton Yogyakarta yang mendorong sikap lebih akomodatif terhadap Residen Belanda yang baru bernama Huibert Gerard Nahuys van Burgst (menjabat 1816-1822). Dia pula yang mendorong politik baru dengan menyewakan lahan kerajaan kepada pengusaha Eropa dan Tionghoa.⁴⁴ Akhirnya, pada ujung abad ke-19, seorang janda raja yang juga bergelar Ratu Kedaton, yaitu permaisuri sultan kelima (bertakhta 1822-1826/1828-1855), menjadi aktor kunci pemberontakan gagal oleh sang anak bernama Raden Mas Muhammad (Pangeran Suryèngologo) terhadap sultan ketujuh (bertakhta 1877-1921) pada 1883 di Kedu, ketika sang ratu yang umurnya

³⁸ *Ibid.*, hlm. 539-542.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 91-96.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 87.

⁴² Peter Carey dan Vincet Houben, *op.cit.*, hlm. 72.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Peter Carey, (2012), *op.cit.*, hlm. 425-426.

menjelang umur 50 tahun, sempat menyeberangi Kali Krasak dengan kuda pada musim hujan.⁴⁵

Sebenarnya, contoh wanita perkasa terus mengilhami para sastrawan dan pelopor bangsa pada zaman kebangkitan nasional. Peran ibu Jawa sebagai penegak nilai-nilai tradisional sering dikedepankan. Hal ini dicerminkan secara menarik dalam sandiwara dramawan Indo bernama Victor Ido berjudul *Pangeran Negoro Joedho* (1918), yaitu ketika sang ratu tua meracuni penerus takhta Yogyakarta karena putra mahkota itu – setelah menempuh pendidikan di Belanda – ingin menyingkirkan semua kebiasaan lama di keraton.⁴⁶

Tema itu juga diangkat oleh Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (1877-1943) dalam *Herinneringen* (*Kenang-Kenangan*) dan Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) dalam roman terkenal *Bumi Manusia*, yang mengisahkan sejarah Hindia Belanda dan awal zaman kebangkitan nasional. Mereka menjelaskan seorang anak remaja – Djajadiningrat sendiri dalam kasus *Herinneringen* dan Minke, sosok utama dalam roman *Bumi Manusia* – dituntun dalam *ngèlmu kejawèn* oleh ibunda dan ibu angkat/mertua (Nyai Ontosoroh).

V. PENUTUP

Wanita Jawa pernah mengambil peran cukup signifikan dalam urusan politik dan masyarakat. Salah satu peran utama putri raja dan bangsawan keraton adalah sebagai pemelihara dinasti atau wangsa serta pewaris tradisi Jawa. Meskipun peran mereka dalam urusan seremonial, militer, dan bisnis sangat penting dalam tahun-tahun menjelang Perang Jawa, tetapi peran utama putri raja dan bangsawan keraton adalah sebagai pemelihara dinasti atau wangsa. Dengan demikian, mereka memelihara hubungan kekerabatan antara raja dan keluarga terkemuka kerajaan dengan mengikat istana dalam suatu jaringan intim dengan

dunia perdesaan Jawa melalui ikatan kekeluargaan yang luas.

Beberapa raja di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-19 memang membanggakan diri atas kekuatan seksual dengan memiliki banyak wanita simpanan. Namun, sesuatu yang jauh lebih penting adalah latar belakang keluarga wanita pendamping raja. Pernikahan serta pertunangan anak-anak dan kerabat dekatnya memang diatur dengan tujuan pokok membentuk aliansi politik dengan keluarga lokal yang kuat atau berpotensi bermusuhan. Inilah alasan para wanita dari keluarga atau area tertentu dipilih menjadi permaisuri. Dalam kasus ini, kecantikan kalah abu dibandingkan manfaat politik yang bisa diperoleh dari perkawinan tersebut.

Sebagai ibu dari anak-anak kerajaan, istri-istri para raja Jawa Tengah bagian selatan juga tidak hanya bertugas memastikan keberlangsungan dinasti, melainkan juga dituntut melestarikan nilai-nilai budaya dan spiritual Jawa melalui pemeliharaan adat keraton dan pendidikan anak raja. Sebagai pendidik dan wali anak-anak kerajaan, wanita keraton pada akhir abad ke-18 dan awal ke-19 memiliki pengaruh paling besar. Hal itu terjadi ketika beberapa anak kerajaan – biasanya pada usia dini – dipercayakan atau “dipinjamkan” kepada anggota keluarga lain di luar keraton, sesuatu yang masih berlaku dalam keluarga Jawa hingga sekarang. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk tujuan pendidikan saja, melainkan juga karena si bayi dianggap mempunyai bakat yang luar biasa atau demi memperkuat hubungan antara raja dengan kerabat dekatnya, terutama kepada mereka yang tidak lagi mempunyai anak sendiri.

Sebenarnya, para wanita Jawa terus mengilhami para sastrawan dan pelopor bangsa pada zaman kebangkitan nasional. Peran ibu Jawa sebagai penegak nilai-nilai tradisional sering dikedepankan. Hal ini dicerminkan secara menarik dalam salah satu sandiwara dramawan Indo bernama Victor Ido

⁴⁵ Ann Kumar, *Prajurit Perempuan Jawa: Kesaksian Ihtwal Istana dan Politik Jawa Akhir Abad ke-18*, (Depok: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 251.

⁴⁶ Peter Carey, (2012), *op.cit.*, hlm. 75.

berjudul *Pangeran Negoro Joedho*. Tema itu juga diangkat oleh Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat dalam *Herinneringen (Kenang-Kenangan)* dan Pramoedya Ananta Toer dalam roman terkenal *Bumi Manusia*.

DAFTAR PUSTAKA

- Carey, Peter dan Vincet Houben. (2018). *Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Carey, Peter. (1981). *Babad Dipanegara: An Account of the Outbreak of the Java War (1825-1830)*. Kuala Lumpur: Art Printers.
- _____. (1992). *The British in Java 1811-1816: A Javanese Account*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. (2012). *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gottschalk, Louis, (peny.). (2006). *Mengerti Sejarah*. terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hadi, Sutrisno. (1998). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ihsanuddin, “Jokowi Tunjuk 9 Anggota Pansel KPK, Semuanya Perempuan”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/21/084731-41/Jokowi.Tunjuk.9.Anggota.Pansel.KPK.Semuanya.Perempuan>. Diakses tanggal 13 Agustus 2020.
- Kumar, Ann. (2008). *Prajurit Perempuan Jawa: Kesaksian Ihtwal Istana dan Politik Jawa Akhir Abad ke-18*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mandoyokusumo. (1977). *Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat*. Yogyakarta: Bebadan Museum Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
- Padmasusastra. (1902). *Sajarah Dalem Pangiwa lan Panengen*. Semarang: Van Dorp.
- Ricklefs, Merle Calvin. (2006). *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries*. East Bridge Norwalk: Signature Books.
- Soemardjan, Selo. (1962). *Social Changes in Yogyakarta*. Ithaca: Cornell University Press.

